

EDISI : Rabu, 20 November 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

		Buleleng Raih Penghargaan Kota Sehat 2019	Buleleng kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini, kota Singaraja meraih penghargaan kota sehat tahun 2019. Penghargaan ini diselenggarakan oleh kementerian kesehatan bersama dengan kementerian dalam negeri. Penghargaan diserahkan langsung oleh menteri dalam negeri. Tito Karnavian bersama dengan menteri kesehatan, terawan Agus Putrato kepala Asisten bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat setda buleleng, Ni Made Rousmini,S.Sos.,MAP mewakili Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana,ST di kantor Kemendagri, selasa (19/11).	
--	--	---	--	--

RESUME BERITA

EDISI : Rabu, 20 November 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	NUSA BALI	IPK Minimal 3,0 Hadang Pelamar CPNS	Jumlah pelamar dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 untuk Pemkab Buleleng, diprediksi tidak seramai tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi menyusul persyaratan bagi calon pelamar cukup ketat. Pelamar minimal memiliki nilai IPK 3,0 dan kualifikasi pendidikan juga harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Saat penerimaan CPNS tahun lalu, IPK pelamar minimal 2,7.	
		Pangkas 3, Tambah 1 lembar Baru	Perampingan struktur organisasi kelembagaan Pemkab Buleleng kini menunggu pengesahan, menyusul kesempatan antara eksekutif dengan legislative. Dalam kesepakatan itu, tercatat tiga dinas yang dilebur dan ada satu lembaga baru. Sehingga tahun 2020, jumlah dinas tinggal 21 instansi dari sebelumnya 24 instansi. Sementara badan daerah akan bertambah menjadi 6 instansi, dari sebelumnya 5 instansi.	
2	FAJAR BALI	Suradnyana terima DIPA dan TKDD Tahun 2020	Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST menerima daftar isikan pelaksanaan anggaran dan dana alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2020 yang diserahkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto, Selasa (19/11). Penyerahan ini diselenggarakan di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.	



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Shortcut

Penlok "Shortcut" 7-10 Terbit

Pembebasan Lahan di Tiga Desa Direalisasikan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menerbitkan izin penetapan lokasi (penlok -red) pembangunan lanjutan jalan baru batas kota Singaraja – Mengwitani atau lebih dikenal dengan *shortcut* titik 7 sampai 10. Dari tahapan awal pembebasan tanah itu terungkap sebanyak 145 warga terdampak pembangunan *shortcut* titik 7, 8, 9, dan titik 10. Dari ratusan pemilik lahan di sana, pemerintah diperkirakan akan membeli tanah warga seluas 31,41 hektar untuk membangun jalan *shortcut* itu. Lalu, bagaimanakah proses pembebasan lahan warga di Desa Wanagiri, Pegayaman dan Desa Gitgit itu?

BERDASARKAN izin penlok yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster, tanah warga di Desa Wanagiri, Pegayaman, dan Desa Gitgit (Kecamatan Sukasada) itu telah ditetapkan menjadi jalur proyek. Atas penetapan itu, transaksi jual beli tanah di

tiga desa itu mulai dibatasi. Ini karena, Pemprov Bali dalam waktu dekat dipastikan akan merealisasikan pembebasan tanah milik warga tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bali Nyoman Astawa Riadi melalui sambungan tele-

pon Selasa (19/11) kemarin, mengatakan, izin penlok terbit 14 November 2019 lalu. Izin itu diterbitkan melalui SK Gubernur Bali No. 2227/01-A/HK/2019. Pada SK itu juga dilampirkan peta lokasi tanah warga yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan *shortcut* itu.

Sesuai peta tersebut, Pemprov memerlukan tanah seluas 31,41 hektar. Kebutuhan lahan seluas itu bisa saja bertambah. Sesuai hasil tahapan pembebasan tanah yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) pembebasan tanah itu telah dibentuk Pemprov Bali. Izin penlok itu sudah ditetapkan dan sekarang menginjak proses pembebasan tanahnya. Kalau sebelum izin penlok itu terbit yang bekerja adalah Satgas A. Namun, setelah

izin penloknya terbit, giliran Satgas B yang kerja. "Satgas B memang tugasnya memproses pembebasan tanah lokasi *shortcut* itu," katanya.

Satgas B nantinya, kata Astawa, kembali akan menelusuri tanah warga yang telah masuk lokasi proyek itu. Satgas B akan memasang patok sebagai acuan tim *appraisal* untuk menghitung nilai harga tanah di sana. Penilaian itu dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen. "Semuanya akan dinilai, apakah itu harga tanah, bangunan, tanaman, bahkan hingga keperluan *upakara* juga dihitung satgas yang beranggotakan rekan-rekan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk kejaksan yang bertugas sebagai pendampingan," jelasnya. (mud)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : CPNS

Baru 427 Pelamar CPNS Mendaftar Diduga Banyak Terkendala Persyaratan IPK 3,0

Singaraja (Bali Post) -

Pengumuman masa pendaftaran perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 berlangsung satu minggu. Hasilnya, sampai Selasa (19/11) kemarin, sekretariat panitia perekrutan menerima berkas pendaftaran sebanyak 427 pelamar. Jumlah pelamar yang mendaftar itu masih tergolong minim. Diperkirakan, mengapa peminat perekrutan CPNS tahun ini masih sepi karena persyaratan harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK-red) sebesar 3,0. Nilai tersebut diduga terlalu tinggi, sehingga banyak pelamar tidak bisa memenuhi syarat nilai itu.

Pantauan di sekretariat perekrutan menunjukkan, untuk formasi guru tercatat ada pelamar 179 orang. Tenaga kesehatan 113 orang telah mendaftar, pelamar pada formasi tenaga teknis ada 145 orang yang telah mendaftar. Para pelamar dari Buleleng dan luar daerah ini menyerahkan berkas pendaftaran yang dinyatakan telah lengkap.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa saat mengikuti rapat di gedung DPRD Buleleng kemarin mengatakan, dari data pelamar yang sudah mendaftar masih tergolong minim. Padahal, perekrutan CPNS tahun ini ada empat kabupaten di Bali yang tidak melakukan perekrutan, sehingga pelamar mestinya membeludak. Namun, dirinya memperkirakan pelamar baru akan membeludak menjelang batas akhir penutupan pendaftaran antara 22 sampai 24 November 2019 ini. Tanggal 24 November itu merupakan batas akhir masa pendaftaran administrasi. "Mungkin dari pengala-

man perekrutmen tahun-tahun sebelumnya mereka tidak ingin gagal karena syaratnya tidak lengkap, sehingga pelamar ini sangat hati-hati sebelum mendaftar. Kalau terburu-buru mendaftar dan ada kesalahan nama, kesalahan foto, atau berkas lainnya maka tidak bisa diperbaiki dan otomatis gugur," katanya.

Selain itu, birokrat asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar ini menyebut, penyebab sepi nya pendaftaran ini karena persyaratan lainnya juga diduga turut memengaruhi calon pelamar. Di antaranya syarat memiliki IPK minimal 3,0 bagi formasi-formasi di Provinsi Bali. Kualifikasi pendidikan yang mengkhusus diduga kerap menjadi batu sandungan bagi calon pelamar gugur di tengah jalan. Pelamar yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan mengkhusus itu diprediksi melamar ke daerah lain yang notabene penentuan PIK-nya tidak sama. "Secara pasti, kami tidak mengetahui penyebabnya, namun memang kualifikasi pendidikan dengan IPK sebesar itu memang diatur untuk perekrutan CPNS di Bali. Kalau tidak memenuhi ketentuan itu, otomatis gugur. Namun, kami prediksi pelamar akan lebih banyak lagi, sebab ada empat kabupaten tidak merekrut CPNS kali ini," jelasnya.

Untuk membantu kelancaran pendaftaran, BKPSDM memberikan layanan konsultasi terkait teknis pendaftaran melalui sistem komputerisasi. Calon pelamar yang masih ragu-ragu dan kesulitan memahami persyaratan yang dipenuhi, dipersilakan mengajukan pertanyaan pada petugas yang telah disiapkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2019 ini, Buleleng mendapat formasi menambah PNS baru sebanyak 389 orang. Rinciannya, formasi tenaga guru sebanyak 198 orang, kesehatan 99 orang, dan formasi tenaga teknis lainnya 61 orang.

Dibandingkan formasi CPNS yang disetujui tahun 2018 lalu sebanyak 332 formasi, sehingga tahun ini jatah menambah PNS baru naik lagi 59 orang. Hanya, pada perekrutan tahun lalu, pelamar yang mendaftar mencapai 5.607 orang. (kmb38)



Gede Wisnawa



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : OPD

Dewan Setuju Perampangan OPD

Singaraja (Bali Post) -

Selain sibuk membahas Rancangan APBD tahun 2020, DPRD Buleleng juga harus menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah (ran-perda) tentang struktur dan kedudukan perangkat daerah. Regulasi ini nantinya mengatur perampangan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Buleleng. Rancangan untuk melebur tiga OPD itu telah disetujui dewan.

Kesepakatan rancangan pembahasan Perda perampangan OPD itu terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi-komisi dengan pemerintah Selasa (19/11) kemarin. Rapat ini dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna dan pemerintah diwakili Asisten Tata Pemerintahan Putu Karuna.

Dari rapat itu, telah disetujui tiga instansi dirombak yaitu Dinas Perikanan (Diskan) dijadikan satu dengan Dinas Ketahanan Pangan. Alasan mengapa Diskan digabung karena kebijakan pemerintah telah mengambil alih kewenangan ke tingkat provinsi. Kebijakan ini memaksa Dinas Perikanan menjadi terbatas, sehingga lembaga itu kinerjanya kurang produktif.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop-UKM) juga dijadikan satu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sebelumnya, urusan Koperasi dan UKM berada dalam instansi induknya yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag). Belum terlalu lama memisahkan diri, kedua urusan itu kembali ditarik ke induknya dengan pertimbangan kinerja Diskop-UKM kurang produktif. Sehingga setelah dijadikan satu, maka kinerjanya diharapkan maksimal, lebih efektif, dan efisien.

Dinas Statistik yang notabene bentukan lembaga baru juga bernasib sama. Belum cukup lama lembaga ini dibentuk, sekarang ditarik untuk bergabung dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfosandi). Sebenarnya, Dinas Statistik cukup produktif mendata dan mengolah data teknis. Akan tetapi, data itu tidak dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Pasalnya, undang-

undang menyatakan bahwa data yang dapat dijadikan acuan adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tidak saja menyetujui penggabungan instansi, juga disetujui membentuk satu OPD baru. Lembaga anyar ini dibentuk dengan melebur

Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang). Usulan Litbang dijadikan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah. Alasan membentuk badan ini

untuk menyiapkan bidang penelitian dan pengembangan terkait kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, ide memecah OPD juga mengemuka saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD, beberapa waktu lalu. Dari rapat itu muncul pemikiran "melebur" Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang tugas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diusulkan digabung

ke Dinas Kesehatan (Diskes). Urusan Pemberdayaan Perempuan dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan tugas Perlindungan Anak digabung ke Dinas Sosial (Dinsos). Akan tetapi, ide itu tidak masuk materi pembahasan rancangan perda kemarin.

Sepakat Usulan Eksekutif Ketua DPRD Gede Supriatna didampingi Kabag Humas dan Pengawasan Made Supartawan mengatakan, de-

wan sudah sependapat dengan usulan eksekutif. Perampangan ini sudah sesuai visi dan misi pemerintah pusat, yakni melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya melakukan perampangan birokrasi itu sendiri. Terkait kesiapan anggaran dan sumber daya manusia (SDM), Supriatna menyebut hal itu sudah dipersiapkan dalam pembahasan RAPBD tahun 2020. Itu artinya, setelah regulasi tentang perampangan kelembagaan daerah ini disahkan, maka sudah dinyata-

kan resmi dan sambil berjalan akan dilengkapi dengan kebutuhan anggaran, SDM dan infrastruktur gedung kantor itu. "Pada prinsipnya sepakat ada perampangan OPD. Soal anggaran sudah dipersiapkan dalam APBD induk yang akan kita paripurnakan pada sidang bulan ini," tegasnya.

Asisten Tata Pemerintahan Putu Karuna mengatakan, perampangan itu sudah berdasarkan kajian yang ada. Perampangan itu akan dimulai tahun 2020 nanti. Dinas daer-

ah akan berkurang menjadi 21 instansi dari sebelumnya 24 instansi. Sedangkan badan daerah bertambah menjadi 6 instansi, dari sebelumnya 5 instansi. Untuk pembentukan Badan Litbang, Karuna menyatakan instansi itu akan memberikan masukan untuk pengembangan potensi daerah. "Dari hasil evaluasi dan analisis, memang penggabungan itu akan membuat kinerja instansi menjadi lebih efektif dan produktif," katanya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *Sambungan*



Bali Post/kemb33
AMPINGAN OPD - DPRD menyetujui pembahasan rancangan perda terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Buleleng, Selasa 1) kemarin.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Meninggal

Perbekel Desa Bontihing Terpilih Meninggal Dunia Mendadak

Singaraja (Bali Post) -

Perbekel Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Ketut Daging Arta yang terpilih pada pemilihan perbekel (pikel) serentak 31 Oktober 2019 lalu, mengalami nasib tragis. Sebelum dilantik menjadi perbekel definitif, Daging Arta meninggal dunia mendadak. Kejadian ini mengejutkan keluarga, kerabat, dan warga di desanya. Belum diketahui secara pasti, apa penyebab Daging Arta meninggal dunia. Saat mengikuti laga pikel serentak, almarhum unggul setelah merebut 1.747 suara sah.

Informasi dikumpulkan Bali Post, sebelum kejadian itu, almarhum mengikuti rapat dengan para perbekel terpilih bersama pengurus Forum Komunikasi Perbekel Desa (Forkomdes) Kecamatan Kubutambahan. Pertemuan ini membahas persiapan pelantikan perbekel hasil pikel serentak.

Sehabis rapat itu, sekitar pukul 14.00 Wita, almarhum kemudian menuju kantor Koperasi Loka Amerta Utama di Kelurahan Banyuasi. Sebelum ikut pikel serentak, almarhum menjadi pengurus di koperasi itu. Sekitar pukul 15.00 Wita, tiba-tiba almarhum terjatuh di ruang kantor koperasinya. Tubuhnya lemas sampai tidak sadarkan diri, sehingga rekan kerjanya di koperasi itu kemudian mengantarkan berobat ke rumah sakit.

Belum sempat mendapat perawatan dokter, ternyata

Daging Arta yang sebelumnya bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Jembrana dinyatakan meninggal dunia. Dengan cepat kabar duka itu menyebar. Pihak keluarga, kerabat, dan warga di kampungnya sangat terkejut. Wajar saja mereka tidak menyangka kalau almarhum yang akan memimpin desa mereka itu telah berpulang.

Camat Kubutambahan Made Suyasa dihubungi kemarin, membenarkan perbekel terpilih Daging Arta itu meninggal dunia. Dia mengatakan, sebelum kejadian itu almarhum tidak menunjukkan tanda-tanda sedang mengalami sakit. Almarhum sendiri sedang mempersiapkan keperluan pelantikan sebagai perbekel definitif. Bahkan, sebelum mengembuskan napas terakhirnya, almarhum sempat menghubungi Sekretaris Desa (Sekdes) untuk

membicarakan terkait persiapan pelantikan dan program pemerintahan desa.

"Setelah rapat menghubungi Sekdes dan menanyakan soal persiapan pelantikan terkait masalah transfer dan program pembangunan di desa. Sampai di kantor koperasi yang dikelolanya itu, almarhum jatuh pingsan dan meninggal dunia," katanya.

Terkait, penyebab meninggalnya, birokrat asal Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan itu menyebut belum mendapatkan informasi pasti. Hanya sebelum dilarikan ke rumah sakit, almarhum terjatuh hingga pingsan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng Made Subur mengatakan, laporan secara resmi perbekel terpilih Daging Arta meninggal dunia belum diterimanya. Namun, Subur mengaku terkejut

dan tidak menyangka kalau yang bersangkutan meninggal dunia sebelum dilantik.

Terkait tindak lanjut kejadian itu, Subur mengatakan, sesuai regulasi kalau perbekel terpilih itu meninggal dunia, maka penggantinya dipilih melalui Pergantian Antar-Waktu (PAW). Ini dilakukan dengan pengajuan surat PAW dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati Buleleng melalui camat. Surat itu kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi BPD melaksanakan pemilihan dengan cara PAW. Tahapan ini dilakukan dengan musyawarah desa (musdes) di mana masing-masing dusun mengajukan calon perbekel PAW. Setelah calon ditetapkan, maka tinggal melakukan proses pemilihan untuk ditetapkan perbekel PAW.

"Laporan belum saya terima, namun kalau memang yang bersangkutan meninggal, nanti penggantinya dilakukan pemilihan PAW. SK yang bersangkutan sudah disusun karena pelantikan dijadwal tanggal 24 Desember 2019 nanti. SK itu dianulir setelah ada pengganti melalui hasil PAW," jelasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG